

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan pasar modal yang sangat pesat memberikan dampak bagi perusahaan-perusahaan yang sudah go public untuk berlomba-lomba mencapai tujuan perusahaan (Mutammimah, 2020) [1]. Tujuan perusahaan tersebut diantaranya yaitu untuk mencapai keuntungan maksimal, memakmurkan pemilik atau pemegang saham dan memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya (Wijaya dan Sedana 2015) [2]. Karena harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi dan semakin tinggi pula keuntungan pemegang saham. Menurut Nurhani dan Fauziah (2019) [3] para investor yang akan melakukan investasi di pasar modal (Bursa Efek Indonesia) akan memilih saham perusahaan mana yang paling menguntungkan, salah satu cara yang dilakukan oleh para investor adalah dengan melakukan analisis atau penilaian terhadap kinerja perusahaan emitem (perusahaan yang mengeluarkan saham).

Tabel 1.1

Perbandingan Harga Saham IHSG, Indeks LQ45 dan Kompas 100 Periode 2015-2019

Periode	IHSG		LQ45		Kompas 100	
	(Rp)	% Perubahan	(Rp)	% Perubahan	(Rp)	% Perubahan
2015	4,593.00	-13.8	792.03	-13.45	986.73	-16.00
2016	5,296.71	13.28	884.62	11.69	1,116.64	11.64
2017	6,355.65	16.66	1,079.39	22.01	1,343.42	16.89
2018	6,194.49	-2.60	982.73	-9.83	1,258.17	-6.78
2019	6,299.54	1.68	1,014.47	3.23	1,227.34	-2.51

Sumber : Statistika Pasar Modal 2020 (OJK) dan *investing.com* (diolah 2021)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa adanya kejadian kenaikan dan penurunan saham pada kategori IHSG, LQ45 dan Kompas 100. Pada tahun 2015 yaitu IHSG (13.8%), LQ45 (13.45%) dan Kompas 100 (16%). Sedangkan 2018 yaitu IHSG (2.6%), LQ45 (9.83%) dan Kompas 100 (6.78%). Lalu di tahun 2019 Kompas 100 juga mengalami penurunan (2.51%). Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan fenomena bahwa pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sahamnya mengalami fluktuasi. Bahkan harga saham LQ45 dan Kompas 100 yang memiliki kriteria pilihan lebih spesifik juga mengalaminya. Seharusnya, Saham LQ45 dan Kompas

100 yang memiliki kriteria yang lebih spesifik mampu menunjukkan peningkatan menyeluruh. Maka dari itu peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham tersebut.

Telah diketahui bahwa harga saham secara penuh menunjukkan semua aspek kinerja perusahaan. Investor membutuhkan informasi untuk mengetahui apakah perusahaan dalam kondisi tumbuh, tidak tumbuh (stagnan) atau bahkan menurun, sehingga mereka dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dalam kondisi tersebut. Untuk mendapatkan informasi yang dapat dibandingkan secara relevan maka perlu pengukuran yang tepat. Upaya pengukuran tersebut dalam penelitian ini yang dirasa tepat yaitu Rasio Tobin's Q. Dengan begitu nilai perusahaan diukur dengan nilai Tobin's Q. Rasio Tobin's Q mampu menunjukkan historis performa manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan dari keberhasilan masa lalu dan prospek di masa depan. Apalagi dalam mengelola operasional dari produk yang dihasilkan, perusahaan sektor farmasi memiliki biaya penelitian dan pengembangan (R&D) yang cukup tinggi. Kondisi memungkinkan liabilitas perusahaan sub sektor farmasi. Seperti pada tahun 2019 perusahaan kalbe farma dengan liabilitas Rp 3,5 T, kimia farma Rp 10 T, dan tempo scan pacific Rp 2,5 T.

Peningkatan nilai perusahaan bisa dicapai apabila manajemen perusahaan mampu menjaga kepentingan pihak lain di dalam membuat keputusan-keputusan keuangan. Pihak lain tersebut diantaranya meliputi *shareholder* dan *stakeholder* (Basuki dan Siregar 2019) [4]. Salah satu upaya yang diharapkan mampu untuk menjaga kepentingan *shareholder* dan *stakeholder* yaitu menerapkan *corporate governance*. Menurut Syafitri et al. (2018) [5] *Corporate governance* merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, *shareholder* pada khususnya dan *stakeholder* pada umumnya.

Fenomena adanya praktik fraud terjadi pada Perusahaan Waskita Karya terjadi kasus lima mantan pejabat Waskita Karya didakwa jaksa KPK dengan memperkaya diri terkait kasus korupsi proyek infrastruktur fiktif. Melalui mekanisme menghimpun dana *non budgeter* dengan cara membuat kontrak pekerjaan-pekerjaan subkontraktor fiktif yang melekat pada proyek-proyek utama yang dikerjakan oleh Waskita Karya, yang nantinya pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan kepada perusahaan-perusahaan

subkontraktor fiktif tersebut dikembalikan lagi (cash back) kepada Divisi Sipil/Divisi III/Divisi II Waskita Karya. Karena penelitian ini akan berfokus pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi. Fenomena lainnya pada sektor farmasi diantaranya :

Tabel 1.2
Kasus Fraud Pada Perusahaan Farmasi

Perusahaan	Kasus
Indofarma	Kasus pada PT Indofarma, ditemukan bukti bahwa terdapat nilai barang yang terindikasi mengalami penilaian lebih tinggi dari nilai yang seharusnya dalam penyajian nilai persediaan barang pada tahun buku 2004 sebesar Rp28,87 miliar. Akibatnya penyajian terlalu tinggi (overstated) pada persediaan, harga pokok penjualan disajikan terlalu rendah (understated) dan laba bersih disajikan terlalu tinggi (overstated) dengan nilai yang sama (Anggana dan Prastiwi 2013) [6].
Kimia Farma	Kasus PT.Kimia Farma pada tahun 2002 diketahui untuk laporan keuangan periode akuntansi 2001 PT.Kimia Farma mengalami penggelembungan laba bersih senilai Rp.32.668 miliar dan menyeret sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menjadi auditor PT. Kimia Farma, sekalipun KAP tersebut yang berinisiatif memberikan laporan adanya overstated tersebut (Anggana dan Prastiwi 2013) [6].

Temuan keadaan kasus-kasus diatas menunjukkan bahwa banyak perusahaan memiliki penerapan *corporate governance* yang rendah. Karena ketidakmampuan perusahaan dalam menunjukkan keterbukaan (*transparency*). Dengan begitu diperlukan penanganan tata kelola yang tepat dalam mengelola perusahaan. Dalam penelitian ini akan berfokus pada bagaimana cara memperhatikan ketepatan perusahaan dalam meningkatkan pengawasan terhadap pihak manajemen. Karena yang menjadi salah satu bentuk konflik dalam melandasi kasus kecenderungan kecurangan laporan keuangan, yaitu adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dengan agen. Dimana pihak manajemen lebih mementingkan kepentingan pribadi. Sehingga peneliti memutuskan adanya kebutuhan membahas *corporate governance*, sebagai upaya ingin mengetahui struktur pengawasan yang tepat dalam menghindari

terjadinya keruntuhan perusahaan dan mampu menaikkan nilai suatu perusahaan.

Dalam penelitian ini *corporate governance* di proksikan oleh beberapa variabel yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan ukuran komite audit. Kepemilikan manajerial akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh manajemen perusahaan (Dewi dan Nugrahanti 2014) [7]. Karena kepemilikan manajerial menunjukkan adanya peran ganda seorang manajer, yakni manajer bertindak juga sebagai pemegang saham. Dengan begitu manajemen akan mensejajarkan kepentingan karena memperoleh manfaat dan kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Berdasarkan hasil Agustini dan Nursasi (2020) [8] menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Menurut suastini et al (2016) [9] kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut Poluan dan Wicaksono (2019) [10] kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Kepemilikan saham oleh institusi atau Lembaga tertentu dengan tinggi jumlah kepemilikan tertentu dianggap akan meningkatkan sistem kontrol perusahaan yang ditujukan guna meminimalisasi tingkat kecurangan akibat tindakan oportunistik pihak manajemen yang nantinya dapat mengurangi nilai perusahaan (Damayanti dan Suartana, 2014) [11]. Maka dari itu kepemilikan institusional dianggap mampu menaikkan nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian (Hidayat et al 2020) [12] kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun menurut Poulan dan Wicaksono (2019) [10] kepemilikan institusional yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Dewan direksi bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan pengelolaan di dalam perusahaan dan melaporkan segala sesuatu yang terkait perusahaan kepada dewan komisaris. Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, salah satu prinsip yang perlu dipenuhi adalah komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen (komite nasional kebijakan *governance*, 2006) [13]. Berdasarkan hasil penelitian Robin (2016) [14] dewan direksi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan sedangkan menurut Thendean dan

Meita (2019) [15] dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG Wicaksono (2014) [16]. Maka dari itu ukuran dewan komisaris dianggap mampu menaikkan nilai perusahaan. Karena meningkatkan pengawasan dan menciptakan hasil kerja yang transparan. Berdasarkan hasil penelitian Syafitri et al (2018) [5] menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan menggunakan Tobin's Q. Sedangkan hasil penelitian Marini dan Marina (2017) [17] Dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Dewan komisaris terdiri dari internal dan eksternal suatu perusahaan. Dewan komisaris yang berasal dari eksternal disebut dengan dewan komisaris independen. Komisaris independen berfungsi untuk menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan yaitu mempunyai anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (Kusumaningtyas dan Andayani, 2015) [18]. Hasil penelitian yang dilakukan Saputra, (2019) [19] menghasilkan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh pada nilai perusahaan sedangkan Alfarisi et al. (2019) [20] komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Menurut Kep. 29/PM/2004, komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Dimana dalam melaksanakan tugasnya, komite audit mengadakan rapat audit yang berfungsi sebagai media komunikasi antar anggotanya dalam menerapkan fungsi pengawasan terhadap perusahaan. Maka dari itu ukuran komite audit dianggap mampu menaikkan nilai perusahaan. Karena mampu memaksimalkan hasil kerja yang transparan. Berdasarkan penelitian Tambunan et al (2017) [21] diambil kesimpulan bahwa komite audit berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian Syafitri et al (2018) [5] menunjukkan bahwa variabel Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan menggunakan Tobin's Q.

Selanjutnya, peningkatan nilai perusahaan melalui koneksi politik. Koneksi politik dianggap dapat menjadi penunjang kinerja perusahaan.

Karena koneksi politik dapat menambah nilai bagi perusahaan yang terhubung dan / atau manajer mereka (Ang et al. 2012) [22]. Menurut Suhartono dan Sany (2015) [23] perusahaan yang memiliki *political connection* akan lebih dapat menikmati pendapatan lebih tinggi dan produktivitas lebih besar. Adanya koneksi politik pada perusahaan, menurut Apriyani et al. (2019) [24] mampu membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak rendah. Namun Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memaparkan *profitabilitas* BUMN karya terus merosot. Indikatornya bisa dilihat dari return on assets (ROA) dan return on equity (ROE). Hal ini dipicu oleh sikap pemerintah yang menggempurkan proyek infrastruktur tanpa berpikir lebih matang terhadap posisi keuangan perusahaan-perusahaan pelat merah. Peneliti INDEF Madelan mengungkapkan pemerintah belakangan ini bukannya menaikkan suntikan dana untuk BUMN, melainkan bergantung dengan perusahaan konstruksi pelat merah untuk merealisasikan berbagai pembangunan infrastruktur (www.cnnindonesia.com 2019) [25]. Bahkan bukan hanya kondisi profitabilitas BUMN karya yang mengalami kemerosotan pada tahun politik yaitu tahun 2019. BUMN sektor farmasi juga terjadi kemerosotan yang dapat dilihat dari *return on assets* (ROA) yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
ROA Pada Perusahaan Sub Sektor Kontruksi di Tahun 2015-2019

Tahun	ROA					
	BUMN			SWASTA		
	WEGE	WSKT	PTPP	DGIK	IDPR	PSSI
2015	8	3.46	5.01	1.4	16.49	(11.41)
2016	7.06	2.95	4.56	(2.5)	7.78	(14.36)
2017	6.42	4.29	4.72	(0.17)	6.19	3.85
2018	7.55	3.71	4.15	(3.65)	1.62	12.73
2019	7.36	3.22	2.04	(1.6)	(0.18)	9.28

Sumber : IDX Laporan Tahunan 2021

Tabel 1.4
ROA Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi di Tahun 2015-2019

Tahun	ROA					
	BUMN			SWASTA		
	INAF	KAEF	PEHA	SIDO	PYFA	DVLA
2015	0,92	7.61	4.9	15.6	1.93	7.8
2016	(1.25)	5.8	7.1	16.1	3.08	9.9

2017	(3.02)	4.49	10.7	16.9	4.47	9.9
2018	(2.27)	4.34	9.7	19.9	4.52	11.9
2019	0.58	(0.7)	8.6	22.8	4.9	12.1

Sumber : IDX Laporan Tahunan 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja perusahaan BUMN karya sektor kontruksi dan bahkan sektor farmasi yang dicerminkan oleh ROA mengalami penurunan di tahun 2019. Di sektor kontruksi WEGE 7.36%, WSKT 3.22% dan PTPP 2.04%. Sedangkan di sektor farmasi yaitu KAEF (0.7)% dan PEHA 8.6%. Penurunan ROA diduga terjadi karena biaya politik pada tahun pemilu 2019 tinggi. Alokasi anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp25,29 triliun untuk pelaksanaan Pemilu 2019 yang naik 61% dibandingkan dengan 2014 yang hanya Rp15,62 triliun. Pada tabel diatas menunjukkan kondisi ROA pada perusahaan Swasta dan perusahaan BUMN di sektor kontruksi dapat terindikasi bahwa perusahaan BUMN yang memiliki hubungan politik memiliki resiko ketidak pastian keuangan lebih rendah dibandingkan perusahaan swasta. Namun kondisi ROA pada perusahaan di sektor farmasi mengalami keadaan sebaliknya. Perusahaan yang memiliki resiko ketidakpastian keuangan lebih rendah terjadi pada perusahaan Swasta.

Sehingga peneliti memutuskan adanya kebutuhan membahas koneksi politik pada sub sektor farmasi, untuk mengetahui bagaimana koneksi politik mempengaruhi nilai pada suatu perusahaan. Berdasarkan penelitian Dewanti, (2019) [26] disimpulkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan PBV, koneksi politik berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan PER, koneksi politik berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobins'Q.

Lalu yang terakhir peningkatan nilai perusahaan melalui reputasi perusahaan. Menurut Wang et al. (2012) [27] reputasi memiliki dua aspek yaitu kepercayaan dan daya tarik. Kepercayaan akan meningkatkan ekspektasi investor terhadap motivasi perusahaan dan memperoleh daya saing yang menguntungkan. Sedangkan daya tarik dapat mengurangi ketidakpastian tentang kemampuan perusahaan. Menurut Tischer dan Hildebrandt (2011) [28] reputasi perusahaan terbentuk dari persepsi efektivitas perusahaan menjadi sinyal baik bagi investor. Sinyal baik tersebut disebabkan bahwa reputasi perusahaan adalah pendorong utama kinerja berkelanjutan perusahaan.

Tabel 1.5

**Perbandingan Perusahaan yang mengikuti *Corporate Image Award*
Pada Perusahaan Yang *Go Public* dan Bukan *Go Public***

Tahun	Total Perusahaan Go Publik	Perusahaan Go Publik	Perusahaan Bukan Go Publik
2015	501	125	379
2016	516	131	385
2017	553	128	343
2018	616	128	343
2019	671	128	343

Sumber <https://imacaward.com>

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi perusahaan yang *go public* dalam mengikuti acara *corporate image award*. Partisipan oleh perusahaan *go publik* yaitu 2015 sebanyak 125, 2016 sebanyak 31 perusahaan, 2017 sebanyak 128 perusahaan, 2018 sebanyak 128 dan 2019 sebanyak 128 perusahaan. Dari grafik menunjukkan bahwa partisipan dari pihak perusahaan *go public* tidak sampai $\frac{1}{4}$ dari perusahaan yang tercatat di tahun 2017-2019. Hal tersebut mengindikasikan bahwa banyak perusahaan *go public* masih memiliki reputasi yang rendah dibandingkan perusahaan yang bukan perusahaan *go public*. Sedangkan hasil penelitian Daromes dan Gunawan, (2020) menyatakan bahwa reputasi perusahaan berpengaruh positif pada nilai perusahaan tetapi tidak signifikan. Menurut Jao et al. (2020) menyatakan reputasi perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap reaksi investor. Maka dari itu peneliti merasa perlu dalam meneliti kemampuan reputasi perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian ini akan berfokus pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2015-2019. Alasan memilih sektor farmasi ini karena sektor farmasi sangat berkaitan dengan kepentingan umum atau masyarakat. Dengan kepentingan yang luas membuat sektor farmasi ini diatur dan dikendalikan pemerintah. Maka sektor farmasi menjadi objek yang tepat dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peraturan pemerintah akan membentuk jalannya *corporate governance*, *political connection* dan *corporate reputation* terhadap nilai perusahaan. Sedangkan research gap penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penambahan variabel reputasi perusahaan dengan pengukuran *Corporate Image Award* (CIA) dalam skala pengukuran interval.

Motivasi dalam penelitian ini yang pertama, masih banyak terjadi *research gap* terhadap penelitian sebelumnya mengenai nilai perusahaan. Kedua, ingin mengetahui cerminan kepatuhan perusahaan dalam penerapan *corporate governance* dari sudut pandang kebijakan perusahaan yang memiliki hubungan politik dan bagaimana akhir dari putusan perusahaan dalam pembentukan reputasi.

Berdasarkan fenomena-fenomena dan penelitian yang terjadi diatas, maka perlu dilakukan penelitian terhadap pengaruh *Corporate Governance*, *Political Connection* dan *Corporate Reputation* terhadap nilai perusahaan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menguji terjadi penguatan konsistensi terhadap teori maupun penelitian yang ada selama ini atau sebaliknya. Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diberi judul :

“Pengaruh *Corporate Governance*, *Political Connection* dan *Corporate Reputation* Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sub-Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019”.

1.2. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari data score index IHSG, Kompas 100 dan LQ45 yang dipaparkan pada latar belakang menunjukkan bahwa adanya ketidakkonsistenan harga saham yang membuat nilai perusahaan mengalami peningkatan dan penurunan. Maka dari itu perlu adanya kajian terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai perusahaan. Berikut dapat diidentifikasi permasalahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan pada penelitian ini yaitu :

1. Adanya kasus PT Indofarma, dan PT Kimia Farma di sektor farmasi menunjukkan masih adanya tindak fraud/kecurangan dari lemahnya penerapan *corporate governance*.
2. Adanya penurunan kinerja perusahaan yang ditujukan melalui keadaan ROA pada perusahaan BUMN yang diduga memiliki perbedaan akses dengan mendapatkan kemudahan suntikan dana yang diterima oleh perusahaan yang memiliki koneksi politik.
3. Adanya temuan pada perusahaan terbuka atau *go public* bahwa mereka masih memiliki reputasi perusahaan yang rendah karena minimnya

partisipan yang mengikuti *Corporate Image Award* (CIA) dibandingkan yang bukan perusahaan terbuka atau *go public*.

1.2.2 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan ruang lingkup pembahasan agar masalah yang diteliti mempunyai arah yang jelas, maka penulis memberikan batasan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada perusahaan Sub-Sektor Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2015-2019.
2. Perusahaan yang mempublikasikan Laporan Tahunan pada tahun 2015 - 2019.
3. Variabel yang digunakan dalam *corporate governance* adalah Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, dan Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Ukuran Komite Audit.
4. Variabel koneksi politik dilihat yaitu dengan kepemilikan perusahaan, hubungan politik presiden komisaris dan hubungan politik komisaris independen.
5. Variabel yang digunakan dalam *corporate reputation* adalah reputasi perusahaan yang diukur dengan menggunakan data dari *Corporate Image Award* (CIA).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah penulis jabarkan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *corporate governance*, *political connection* dan *corporate reputation* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
5. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
6. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
7. Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
8. Apakah *political connection* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
9. Apakah *corporate reputation* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

1.4. Tujuan

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah *corporate governance*, *political connection* dan *corporate reputation* terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.
3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.
4. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan direksi memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.
5. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.
6. Untuk mengetahui apakah komisaris independen memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.
7. Untuk mengetahui apakah ukuran komite audit memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.
8. Untuk mengetahui apakah *political connection* memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.
9. Untuk mengetahui apakah *corporate reputation* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Perusahaan Sektor Farmasi
Dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan. Diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan mendorong perusahaan untuk menerapkan kebijakan penerapan Corporate Governance yang lebih baik untuk menghindari kegiatan fraud atau kecurangan dalam operasional perusahaan. Sekaligus digunakan sebagai referensi dalam mengelola perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan terkait perhatian bagaimana bersikap untuk menciptakan reputasi perusahaan dan pemanfaatan koneksi politik tanpa melanggar peraturan dengan menimbulkan kecurangan atau fraud yang baru.
- b. Bagi Penelitian Selanjutnya
Sebagai kajian ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi dan manajemen mengenai manfaat penerapan *corporate governance* yang berkualitas, manfaat hubungan politik, manfaat penerapan reputasi

perusahaan dan memberikan informasi sesungguhnya keadaan entitas dengan sebenar-benarnya. Sehingga sinkronisasi antar kepentingan dapat diwujudkan dengan baik.

c. Bagi Investor

Bagi investor penelitian ini juga berguna dalam pengambilan keputusan investasi untuk mengetahui faktor non finansial apa saja yang dapat mempengaruhi pendapatan/*profit* suatu perusahaan.